



---

**KENDALA AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DARI LEMBAGA KEUANGAN**  
*OBSTACLES OF ACCESSIBILITY OF FINANCING FOR MICRO SMALL  
AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) FROM FINANCIAL  
INSTITUTIONS*

**Indra Mualim Hasibuan\*<sup>1</sup> Marliyah<sup>2</sup>**

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jl. IAIN No.1 Gaharu, Kec Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

**E-Mail:** [indrahazby@gmail.com](mailto:indrahazby@gmail.com)

---

**Aksioma: Jurnal  
Manajemen**

*Vol. 3*

*No. 1*

*Halaman 15-24,*

*Bulan Februari, Tahun 2024*

*E-ISSN 228-0997*

**Abstract**

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a vital role in encouraging the development of the country's economy, including contributing to GDP and employment. However, even though MSMEs' contribution to the economy is very central, MSMEs still face several obstacles such as difficult access to financing from financial institutions. The aim that researchers want to achieve in this research is to describe what factors hinder the accessibility of MSMEs to financial institutions, especially banks, and to find out the solutions provided by the government to overcome obstacles to MSMEs' accessibility to financing. This research category is qualitative research with a library study approach, where research data sources are accessed from various literature or documents. Based on research by researchers, there are several factors that hinder the accessibility of MSMEs, including: MSMEs in the eyes of banking financial institutions are not yet bankable, understanding of MSME actors, lack of financial literacy of MSME actors, and complicated financing procedures.

**Keywords:** Obstacles of Accessibility; MSMEs; Financing; Financial Institutions

**Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital untuk mendorong perkembangan perekonomian negara, diantaranya memberikan kontribusi terhadap PDB dan lapangan kerja. Namun meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat sentral, UMKM masih menghadapi beberapa kendala seperti aksesibilitas pembiayaan dari lembaga keuangan yang masih sulit. Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat aksesibilitas UMKM kepada lembaga keuangan khususnya perbankan dan untuk mengetahui solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi hambatan aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan. Kategori penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dimana sumber data penelitian diakses dari berbagai literatur atau dokumen. Berdasarkan penelitian peneliti, terdapat beberapa faktor yang menghambat aksesibilitas UMKM, antara lain: UMKM di mata lembaga keuangan perbankan belum bankable, pemahaman

pelaku UMKM, kurangnya literasi keuangan pelaku UMKM, dan prosedur pembiayaan yang rumit.

**Kata Kunci:** Kendala Aksesibilitas, UMKM, Pembiayaan, Lembaga Keuangan

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu tujuan dalam rangka percepatan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) oleh PBB, inklusi keuangan dijadikan prioritas oleh negara-negara dunia (Iddrisu et al., 2022). Keuangan inklusif adalah ketika dunia usaha dan individu memiliki peluang untuk memperoleh produk keuangan berkelanjutan antara lain tabungan, kredit mikro, pembayaran, pengiriman uang, dan asuransi (Bank, 2022). Landasan penting dalam teori keuangan adalah bahwa lembaga keuangan dan pasar memiliki andil yang cukup besar dalam alokasi sumber daya modal (Soleman & Nainggolan, 2022). Kerangka konseptual aliran dana dibangun berdasarkan teori ini untuk menjelaskan alokasi sumber daya modal di seluruh rumah tangga dan perusahaan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukti dari negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara aliran dana, suku bunga, dan penentuan harga aset, serta pendapatan dan pengeluaran (Demir et al., 2022).

Sektor keuangan telah mengalami revolusi teknologi selama beberapa dekade terakhir (Kanga et al., 2022), inovasi teknologi telah menciptakan model keuangan baru, yang memiliki dampak penting terhadap perekonomian dan keuangan, tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi, namun juga membangun sistem ekonomi informasi baru di kalangan perusahaan, konsumen, dan pemerintah (Li, 2022). Pemberi pinjaman seperti bank dan lembaga keuangan lainnya diketahui sebagai sumber utama peminjam selama ini, akan tetapi sejalan dengan perkembangan teknologi dalam bidang keuangan, telah muncul lembaga keuangan yang baru dan memiliki daya tarik, yakni lembaga *fintech* (Liem et al., 2022). Teknologi keuangan (*fintech*) diakui secara luas sebagai satu instrumen yang penting dalam meningkatkan kualitas inklusi keuangan dan efisiensi keuangan (Wu et al., 2023).

Secara global, per tahun 2018 menurut data Bank Dunia bahwa seperempat orang dewasa tidak memiliki akses terhadap rekening bank, dikarenakan tingginya biaya layanan, kurangnya akses dan kepercayaan pada bank, dan tantangan dalam memperoleh syarat-syarat dokumentasi. Kurangnya akses terhadap instrumen formal untuk menabung atau meminjam, akhirnya menambah kemiskinan, karena kemampuan menabung, meminjam dan menukar uang adalah kunci dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Padahal, kemudahan akses terhadap layanan keuangan memberikan individu kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup (Senyo et al., 2022).

Salah satu bentuk usaha yang menghadapi kesulitan akses permodalan adalah UMKM, survei *DSInnovate* terhadap 1.500 UMKM, ditemukan ada beberapa kendala yang dialami UMKM. Rincian survei tersebut 70,2% pemilik UMKM mengalami kendala pemasaran produk, akses permodalan sebanyak 51,2%, persediaan bahan baku sebanyak 46,3%, dan adopsi digital sebanyak 30,9% (Mawarsari, 2023). Menurut survei Bank Indonesia pada *MSME Empowerment Report* tahun 2022 sebanyak 69,5% UMKM belum menerima pinjaman (Eka, 2023). Berdasarkan survei *Pricewaterhouse Coopers*, UMKM Indonesia masih banyak yang belum mempunyai aksesibilitas pembiayaan yakni sebanyak 74% UMKM (Sandi, 2023).

Padahal dalam struktur perekonomian Indonesia, sektor UMKM adalah sektor ekonomi yang tingkat produktivitasnya mendominasi di atas 99% struktur perekonomian nasional. Akan tetapi eksistensi sektor UMKM dianggap sebagai sektor penopang perekonomian negara, karena dapat bertahan ketika krisis perekonomian, serta menjadi harapan masyarakat dalam menyediakan lapangan kerja, meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran, ditambah menjadi sektor penopang pembangunan nasional dan daerah. Namun, eksistensi sektor UMKM masih terkendala aksesibilitas pembiayaan (Choerudin et al., 2022).

Ada dua kemungkinan kenapa UMKM mengalami kendala suntikan modal, pertama, akses ke bank dan lembaga keuangan lainnya terbatas, dikarenakan tidak adanya aset UMKM yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan atas agunan ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan (bank dan lainnya), atau usaha yang diajukan pemilik UMKM tidak memiliki potensi yang baik menurut perspektif bank dan lembaga keuangan lainnya. Kedua, karena hasil produksi tidak kompetitif di pasaran, sehingga arus kas masuk tidak lancar, dan pada akhirnya membuat pengusaha kekurangan dana segar (Setyawati, 2021).

Sebagai salah satu instrumen penting dalam ketahanan ekonomi, UMKM berkontribusi besar terhadap PDB, pada tahun 2019 sebesar 57,14%, tahun 2020 61,97% (Agustin & Edhie, 2022), pada tahun 2022 sebesar 61,07% terhadap PDB (Khairunnisa et al., 2022). Laporan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM masih minim ketika bercerita kontribusi UMKM ke ekspor, walau dari sisi penyerapan tenaga kerja dan kontribusi ke PDB sudah relatif baik. berikut merupakan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto, tenaga kerja, dan ekspor (Arifin et al., 2023):

**Tabel 1 Perbandingan kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Ekspor dan PDB**

No	Tenaga Kerja (%)		Ekspor (%)		PDB (%)	
1	<b>Indonesia</b>	<b>97</b>	Jerman	55,9	<b>Indonesia</b>	<b>61,01</b>
2	Thailand	85,05	Jepang	53,8	Jerman	53,8
3	Korea	83,1	India	40	Jepang	53
4	Jerman	79	AS	33,7	Singapore	44,7
5	Singapore	71,4	Korea	30,9	AS	43,5
6	Pakistan	70	Thailand	29,5	Thailand	43
7	Jepang	70	Pakistan	25	Vietnam	40
8	Malaysia	66,2	Filipina	20	Malaysia	38,3
9	Filipina	63,2	Vietnam	20	Korea	37,8
10	AS	49,4	Sri Lanka	20	India	37,5
11	India	40	Malaysia	19	Filipina	35,7
12	Vietnam	38	<b>Indonesia</b>	<b>15,8</b>	Pakistan	30
13	Sri Lanka	35	Bangladesh	11,3	Sri Lanka	30

Merujuk data di atas kontribusi UMKM terhadap ekspor masih terbilang minim, karena itu kedepannya daya kompetitif UMKM merupakan salah satu aspek yang harus diperbaiki supaya dapat bersaing di pasar dan dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia. Meskipun kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian, namun UMKM masih menghadapi kesulitan pemasaran produk, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan bahan baku, minimnya inovasi dan teknologi, serta kendala aksesibilitas permodalan (Khairunnisa et al., 2022).

Hal senada disampaikan oleh Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kelompok UMKM, dalam hal akses pembiayaan masih menjadi kendala, karenanya beliau meminta ada peningkatan pembiayaan untuk UMKM (Hafsyah, 2022). Dalam suatu Forum Kajian Pembangunan (FKP) oleh SMERU *Research Institute* dan Tokopedia, riset salah satu penelitiannya bernama Wandira Larasati menyatakan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah sering dipersepsikan sebagai kelompok yang sudah berdaya secara keuangan, manajemen usaha yang modern, memiliki usaha skala besar, dan mandiri dari bantuan dan kemudahan seperti yang diperlakukan terhadap pelaku usaha skala mikro (Nisaputra, 2023):

Permasalahan pembiayaan tentu memiliki dampak terhadap kemunduran UMKM dalam persaingan pasar, dan perekonomian Indonesia akan terganggu sebab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UMKM merupakan salah satu pondasi perekonomian (Rahyono et al., 2023). Hambatan pembiayaan yang dihadapi UMKM menjadi dasar bagi pemerintah (Arifin

et al., 2023) dan perusahaan swasta untuk menyediakan fasilitas lembaga intermediasi keuangan melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Rusastra et al., 2018).

Berdasarkan laporan *International Finance Corporation* diperkirakan di negara-negara berkembang, 21% (29,6 juta) usaha mikro sepenuhnya terkendala, dan 19% (26,6 juta) dibatasi sebagian. Namun, 60% (85,2 juta) masih tidak mempunyai kendala finansial. Gambaran serupa juga terlihat pada segmen UKM di negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, 30% (6,2 juta) UKM terkendala penuh, 14% (2,8 juta) UKM terkendala sebagian, dan 56% (11,7 juta) tidak mempunyai kendala keuangan (Corporation, 2017).

Menteri Koperasi dan UKM (menkop ukm) Teten Masduki ketika melakukan rapat kerja (raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2023 mendeskripsikan bahwa pada tahun 2020 implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor UMKM dari lembaga perbankan sebanyak Rp 4,8 triliun, kemudian program KUR Reguler sebanyak Rp 365,5 triliun, jumlah tersebut terbilang sangat kecil dibandingkan negara lain. Di negara Thailand kredit yang diberikan lembaga bank kepada sektor UMKM di atas 40%. Di negara Korea Selatan mencapai 81%. Tentu miris melihat perbandingan data kehadiran lembaga keuangan di Indonesia, jika dibandingkan dengan dua negara Asia lainnya. Padahal sektor UMKM Indonesia mampu menyediakan 97% kesempatan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebanyak 60%, namun kredit dari lembaga perbankan baru 20% (Nasution, 2023).

Berdasarkan kajian-kajian di atas terkait dengan kendala UMKM memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan membuat peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian kepustakaan dengan judul "**Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Lembaga Keuangan**". Tujuan penelitian diantaranya: untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan dan untuk mengetahui solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi kendala aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan.

Letak perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkapkan solusi apa yang diberikan pemerintah kepada sektor UMKM yang mengalami kendala aksesibilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Penelitian Rita Diana (Diana, 2019) terfokus mengungkapkan faktor-faktor kendala sektor UMKM di Provinsi Sumatera Barat dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Kemudian penelitian Margunani dkk (Margunani et al., 2019) mengungkapkan strategi meningkatkan aksesibilitas sektor UMKM di Kota Semarang terhadap lembaga keuangan dari sektor UMKM sendiri, sedangkan penelitian ini mengungkapkan solusi dari pihak pemerintah selaku fasilitator dalam aktivitas perekonomian.

## LITERATUR EMPIRIS

Salah satu isu penting dalam pembahasan perkembangan UMKM di Indonesia seperti pada umumnya di negara-negara berkembang adalah akses UMKM terhadap pembiayaan (Tambunan, 2021). UMKM merupakan katalisator penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan rumah tangga dalam perekonomian. Karena itu, wawasan tentang bagaimana inklusi keuangan mempengaruhi kinerja UMKM adalah penting dari sudut pandang kebijakan, khususnya bagi negara-negara berkembang di mana UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian negara (Fomum & Opperman, 2023). Meskipun pinjaman bank merupakan sumber pendanaan eksternal yang paling umum bagi UMKM, bentuk pendanaan lain juga harus dipertimbangkan, seperti investasi pemerintah-swasta atau *crowdfunding* (Moritan, 2020).

Penelitian Beck merangkum bukti-bukti kendala dan pola pembiayaan UMKM di negara berkembang dan negara industri baru. Hasil observasinya menunjukkan faktor pendorong terbatasnya akses ke keuangan eksternal bagi banyak UMKM meliputi biaya transaksi dan informasi asimetris antara peminjam dan pemberi pinjaman, dan kegagalan lembaga keuangan yang dimiliki atau dikelola pemerintah. Karena itu, seperti yang disimpulkan penelitiannya, pemerintah memiliki peran penting dalam mereformasi lingkungan kelembagaan, menyediakan kerangka kerja pengaturan dan mendorong persaingan (Tambunan, 2021).

Kurangnya pendanaan dan lemahnya lingkungan bisnis cenderung merugikan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Uganda, serta menguntungkan perusahaan besar. Peningkatan akses terhadap pembiayaan memberikan dampak positif yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar, namun dampaknya tidak signifikan secara statistik (Lakuma et al., 2019). UMKM yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan akan mengalami kesulitan dalam memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, mendorong inklusi keuangan memungkinkan usaha kecil, yang sebelumnya dikecualikan dari saluran keuangan, memperoleh pembiayaan, sehingga menghasilkan produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan penjualan (Lee et al., 2020).

Kesulitan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) selalu menjadi perhatian di Tiongkok, karena lemahnya kekuatan finansial, risiko operasional yang tinggi, dan rendahnya transparansi keuangan (Xiao et al., 2022). Kurangnya akses terhadap modal yang tepat waktu dan memadai, karena lembaga keuangan menganggap UKM berisiko karena operasi yang informal dan tidak jelas. Akibatnya, UKM di China sering menggunakan sumber kredit informal dengan suku bunga tinggi, sehingga memperburuk kesulitan keuangan UKM itu sendiri. Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah seperti pinjaman sektor prioritas, mekanisme jaminan kredit dan promosi peringkat kredit untuk meningkatkan akses kredit bagi UKM (Wang et al., 2019).

Di negara Jepang UKM menghadapi tantangan situasi sulit mendapatkan akses pembiayaan, dibandingkan dengan perusahaan besar. Banyak bank lebih memilih mengalokasikan sumber dananya kepada perusahaan besar dibandingkan UKM. Alasannya adalah perusahaan besar mempunyai risiko gagal bayar dan risiko finansial yang lebih rendah. Di sisi lain UKM lebih berisiko terutama dari sudut pandang pemberi pinjaman dan mereka tidak memiliki informasi akuntansi yang jelas (Yoshino, 2016).

## METODE PENELITIAN

Kategorisasi penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan pendekatan *library research*. Penelitian *library research* merupakan kegiatan ilmiah dengan cara mengumpulkan berbagai informasi atau data, menggunakan media berupa: artikel, buku, jurnal, dan dokumen lainnya (Adlini et al., 2022). Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan salah satu penelitian yang mengenalkan peneliti untuk mengelola kepustakaan. Kepustakaan tentu memiliki banyak data dan fakta yang telah tertulis sehingga memiliki jawaban untuk menjawab permasalahan penelitian (Saputra et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan mayoritas bisnis di seluruh dunia, dan memiliki andil yang besar dalam menggerakkan perkembangan ekonomi negara. Namun, UMKM tersebut menghadapi banyak tantangan karena keterbatasan sumber modal dan ukuran usaha yang kecil, sehingga menghambat pertumbuhan dan ekspansi UMKM (Kumar et al., 2023). Berdasarkan penelusuran peneliti dari berbagai literatur terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pertama, UMKM dianggap belum *Bankable*, maksudnya adalah sektor UMKM sudah termasuk kategori usaha produktif, namun belum memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan dari lembaga perbankan yang disebabkan sektor UMKM belum sanggup menyediakan jaminan/agunan yang sesuai dengan ketentuan Bank (Soemitra et al., 2022). Karena prosedur pembiayaan di bank ada ketentuan yang harus dipedomani oleh individu yang mengajukan pembiayaan. Fungsi agunan yang diajukan lembaga keuangan merupakan alat pengaman yang mampu diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) ketika terjadi wanprestasi atau gagal pembayaran oleh debitur (OJK, 2020).

Menkop UKM Teten Masduki menyatakan dalam acara UMKM *Digital Summit 2023*, kalau syarat yang harus dipenuhi UMKM diantaranya harus ada aset sebagai jaminan, niscaya akan banyak UMKM yang tidak akan dapat mengajukan pembiayaan/kredit ke perbankan. Teten Masduki menambahkan bahwa sekarang telah ada 145 negara yang sudah

mengimplementasikan konsep *credit scoring*, sudah tidak menggunakan pendekatan *collateral* atau jaminan, dimana dalam konsep tersebut agunan dapat berbentuk aset dan lain sebagainya. Karena itu, Teten Masduki sedang menginisiasi supaya sektor UMKM Indonesia untuk *go digital*, setidaknya pencatatan keuangan sektor UMKM sudah *digital* (Rizky, 2023). Sebagai bukti keseriusan UMKM dalam berusaha dan karena instrumen tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan lembaga perbankan menyetujui pengajuan kredit oleh UMKM.

Sebanyak 76% UMKM provinsi Jawa Tengah kesulitan mengakses pembiayaan. Problem aksesibilitas pembiayaan merupakan kendala paling umum yang dialami pelaku UMKM Jawa Tengah, karena dianggap belum *bankable*, padahal jika dilihat dari usahanya sudah layak memperoleh pembiayaan. Kurang lebih hanya 3 juta pelaku UMKM Jawa Tengah yang mempunyai aksesibilitas pembiayaan ke perbankan atau hanya 24%. Sementara sisanya dianggap belum memenuhi syarat pembiayaan kepada lembaga keuangan (Ardiansyah, 2019).

UMKM Provinsi Jawa Barat merupakan UMKM dengan pertumbuhan tertinggi dengan jumlah 1,49 juta. Walau berstatus UMKM dengan pertumbuhan tertinggi lantas menjadikan UMKM Jawa Barat terlepas dari berbagai tantangan, seperti aksesibilitas pembiayaan, kurangnya literasi digital, hingga persaingan produk asing. Misalnya kelompok UMKM Tajur Halang Makmur di Kecamatan Tajur Halang sudah termasuk kelompok UMKM maju. Usaha kelompok UMKM tersebut diantaranya bisnis kuliner, *handycraft* dan *furniture* beranggotakan aktif 75 orang. Akan tetapi masih terhambat akses pembiayaan, seperti terhambat administrasi dan tidak adanya transparansi laporan keuangan sebagai salah satu syarat mendapatkan pembiayaan. Disamping itu, ada beberapa budaya sektor UMKM yang membuat lembaga keuangan tidak tertarik memberikan pembiayaan, diantaranya tidak ada diversifikasi tenaga kerja, manajemen, struktur organisasi dan sistem pembukuan formal (Muharam et al., 2023).

Kedua, pemahaman pelaku UMKM. Ketika seseorang atau pelaku usaha ingin mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan, tentu ada beberapa persyaratan dokumen yang harus disediakan, bagi pihak yang belum memahami prosedur tersebut akan berpikir bahwa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut akan menghabiskan waktu. Sedangkan di pihak UMKM sendiri kebutuhan terhadap modal atau pembiayaan sudah mendesak. Pada akhirnya beberapa pelaku UMKM mengambil langkah pragmatis yakni memilih mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan non-bank, karena lebih sederhana dan pencairan pembiayaan lebih cepat. Gagal pahamnya pelaku sektor UMKM terkait fungsi dan tujuan persyaratan yang diajukan pihak perbankan, merupakan tugas bank untuk melakukan sosialisasi terkait prosedural pembiayaan di bank (Agustin et al., 2023).

Ketiga, kurangnya literasi keuangan UMKM, literasi keuangan merupakan instrumen penting yang harus dimiliki pelaku UMKM agar lebih mudah mengelola dan mengembangkan usaha (Ardila et al., 2020). Minimnya literasi keuangan merupakan salah satu penyebab rendahnya akses pembiayaan ke lembaga keuangan (Suryanto & Rasmini, 2018), sehingga sulit bagi sektor UMKM naik kelas menjadi pengusaha profesional (Sailendra et al., 2020). Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 38,03% (Fadhurrahman, 2023).

Keempat, prosedur pembiayaan yang rumit, pelaku UMKM masih ada yang belum memahami mekanisme dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan non-individu ke lembaga keuangan. Akses pembiayaan UMKM non-individu menghadapi kendala terkait dengan kesepakatan antar pengurus maupun pengurus dengan anggota. UMKM non-individu terkendala karena tidak ada pengurus yang bersedia menjadi penanggung jawab pinjaman. Dalam kasus lain, sudah ada pengurus yang bersedia menjadi penanggung jawab pinjaman. Namun, kesepakatan antar anggota belum ada terkait dengan pengajuan pinjaman. Ketidakeepakatan tersebut karena sebagian anggota kelompok UMKM masih ragu karena merasa khawatir tidak dapat mengangsur. Kendala lain yaitu syarat administratif yang belum lengkap (Bagus, 2020).

Dengan adanya beberapa kendala yang dialami UMKM dalam mengakses pembiayaan atau pengajuan kredit kepada lembaga keuangan khususnya perbankan. Pemerintah kemudian tidak berdiam diri ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa

kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat pembiayaan UMKM diantaranya melakukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan solusi pemerintah terhadap UMKM yang kesulitan mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Pada tahun 2023, pemerintah terus mengoptimalkan program KUR melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Limansetyo, 2023).

Pada tahun 2023 sebanyak 79% penerima program KUR merupakan debitur yang pertama kali menerima KUR. Tercatat sudah ada debitur KUR yang sebelumnya yang naik kelas sebanyak 52%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa UMKM semakin banyak memanfaatkan KUR, disamping itu sudah banyak juga peningkatan kapasitas usaha penerima KUR. Pemerintah juga terus melakukan percepatan penyaluran program KUR. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR sampai bulan Oktober pada tahun 2023 sebesar Rp 199,88 triliun (67,30% dari target Rp 297 triliun) dan juga telah disalurkan kepada 3,61 juta debitur dengan tingkat *non-performing loan* (NPL) sebesar 1,63% (Limansetyo, 2023).

Dalam proses penyaluran dana KUR tersebut, pemerintah tidak lepas tangan. Pemerintah secara rutin memantau dan mengevaluasi Penyalur KUR, pemerintah juga melakukan opsi kerjasama penyaluran KUR dengan pemerintah daerah setempat, optimalisasi proses pengunggahan data calon debitur KUR baru oleh Pemerintah Daerah (Limansetyo, 2023).

## KESIMPULAN

UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi UMKM kepada PDB dan penyedia lapangan kerja. Namun kendati peran sentral UMKM terhadap perekonomian sangat signifikan. UMKM masih mengalami beberapa kendala diantaranya aksesibilitas pembiayaan atau kredit kepada lembaga keuangan formal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya UMKM dianggap oleh lembaga keuangan formal (perbankan) belum *bankable*, pemahaman pelaku UMKM terhadap administrasi persyaratan pengajuan pembiayaan, kurangnya literasi keuangan UMKM terhadap produk lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan yakni penyaluran KUR (kredit usaha rakyat), dimana KUR ini proses pengajuan pembiayaan/kredit lebih mudah daripada pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agustin, & Edhie, S. (2022). *Kajian Tengah Tahun INDEF 2022: Reformulasi Kemandirian Ekonomi di Tengah Dinamika Global*. INDEF. <https://books.google.co.id/books?id=wHx5EAAAQBAJ>
- Agustin, N. H., Brawijaya, A., & Khoer, M. (2023). Aksesibilitas UMKM Pedesaan terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Syariah Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan ...*, 9(1), 10–20. <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/9302%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/JN/article/download/9302/3879>
- Ardiansyah, T. (2019). Model Financial dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166. <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518>
- Ardila, I., Sembiring, M., & Azhar, E. (2020). Analisis Literasi Keuangan Pelaku UMKM. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 216–222.
- Arifin, Z., Cindrakasih, R. R. R., Kertati, I., Dulame, I. M., Harto, B., Pratomo, Y. S., Bintariningtyas, S., Purwanto, R., & Hastuti, D. (2023). *Kebangkitan Bisnis UMKM Pasca Covid 19*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Bagus, S. (2020). *Laporan Kajian Kesenjangan Sisi Permintaan (demand) dan Penawaran (supply) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). [https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/23/id/other\\_doc/Laporan Kajian Kesenjangan Sisi Permintaan dan Penawaran terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil %28UMK%29/download.pdf](https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/23/id/other_doc/Laporan_Kajian_Kesenjangan_Sisi_Permintaan_dan_Penawaran_terhadap_Pembiayaan_Usaha_Mikro_dan_Kecil%28UMK%29/download.pdf)
- Bank, W. (2022). *Financial Inclusion*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1>
- Choerudin, A., Purnomo, A. S. D., Rismayani, G., Sungkawati, E., Firdaus, A., Susandini, A., & Islam, D. (2022). *Manajemen Koperasi dan UMKM*. Global Eksekutif Teknologi. <https://books.google.co.id/books?id=qeGWEEAAQBAJ>
- Corporation, I. F. (2017). *MSME FINANCE GAP: Assessment of the Shortfalls and Opportunities in Financing Micro, Small and Medium Enterprises in Emerging Markets*. [https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data Sites downloads/MSME Report.pdf](https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data_Sites_downloads/MSME_Report.pdf)
- Demir, A., Pesqué-Cela, V., Altunbas, Y., & Murinde, V. (2022). Fintech, Financial Inclusion and Income Inequality: a Quantile Regression Approach. *European Journal of Finance*, 28(1), 86–107. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1772335>
- Diana, R. (2019). Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 67–80. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.67-80>
- Eka, R. (2023). *MSME Empowerment Report 2022*. Daily Social. <https://dailysocial.id/research/msme-report-2022>
- Fadhurrahman, M. N. (2023). *Literasi Keuangan Keluarga: Inklusivitas Keuangan Berbasis Gender, Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas 2045*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4157-literasi-keuangan-keluarga-inklusivitas-keuangan-berbasis-gender,-langkah-strategis-menuju-indonesia-emas-2045.html#:~:text=Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi,Indonesia sebesar 49%2C6>
- Fomum, T. A., & Opperman, P. (2023). Financial Inclusion and Performance of MSMEs in Eswatini. *International Journal of Social Economics*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2020-0689>
- Hafsyah, S. (2022). *Ma'ruf Amin: Pembiayaan dan Modal Masih Jadi Kendala UMKM*. Kantor Berita Radio. <https://kbr.id/nasional/12-2022/ma-ruf-amin-pembiayaan-dan-modal-masih-jadi-kendala-umkm/110550.html>
- Iddrisu, K., Abor, J. Y., & Banyen, K. T. (2022). Fintech, Foreign Bank Presence and Inclusive Finance in Africa: Using a Quantile Regression Approach. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2157120>
- Kanga, D., Oughton, C., Harris, L., & Murinde, V. (2022). The Diffusion of Fintech, Financial Inclusion and Income Per Capita. *European Journal of Finance*, 28(1), 108–136. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2021.1945646>
- Khairunnisa, I., Harmadji, D. E., Ristiyana, R., Mekaniwati, A., Harto, B., Widjaja, W., Malau, N. A., Hayati, T. P. T. N., Faried, A. I., & Purwanti, T. (2022). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Global Eksekutif Teknologi. <https://books.google.co.id/books?id=LX-fEAAAQBAJ>
- Kumar, D., Phani, B. V., Chilamkurti, N., Saurabh, S., & Ratten, V. (2023). Filling the SME Credit Gap: a Systematic Review of Blockchain-Based SME Finance Literature. *Journal of Trade Science*. <https://doi.org/10.1108/JTS-06-2023-0003>
- Lakuma, C. P., Marty, R., & Muhumuza, F. (2019). Financial Inclusion and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Growth in Uganda. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s13731-019-0110-2>
- Lee, C.-C., Wang, C.-W., & Ho, S.-J. (2020). Financial Inclusion, Financial Innovation, and Firms' Sales Growth. *International Review of Economics & Finance*, 66, 189–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.11.021>

- Li, C. (2022). Quantitative Measurement and Analysis of FinTech Risk in China. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 35(1), 2596–2614. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1970606>
- Liem, N. T., Son, T. H., Tin, H. H., & Canh, N. T. (2022). Fintech Credit, Credit Information Sharing and Bank Stability: Some International Evidence. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2112527>
- Limansetyo, H. (2023). *Perkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Percepat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat*. Kemenko Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5473/perkuat-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-pemerintah-percepat-penyuluran-kredit-usaha-rakyat>
- Margunani, Setiawan, A. B., & Kistant, N. R. (2019). Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 13(2), 147–157.
- Mawarsari, M. A. (2023). *Tren Digitalisasi UMKM di Indonesia 2023: Tantangan dan Peluang*. DailySocial. <https://dailysocial.id/post/tren-digitalisasi-umkm-di-indonesia-2023-tantangan-dan-peluang>
- Moritan, M. G. (2020). Financial Inclusion for MSMEs and Women's Economic Empowerment. *Journal of the International Council for Small Business*, 1(1), 7–9. <https://doi.org/10.1080/26437015.2020.1714348>
- Muharam, H., Gursida, H., Hurdawaty, R., Asmana, Y., Suyatno, E., Doktor, P., Manajemen, I., & Pakuan, U. (2023). Sosialisasi Akses Permodalan di UMKM Tajur Halang Makmur Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).
- Nasution, D. D. (2023). *UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim*. Republika. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rq26pl370/umkm-sering-dibanggakan-tapi-pembiayaan-kredit-dari-bank-minim>
- Nisaputra, R. (2023). *UKM Indonesia Masih Hadapi Tantangan dan Hambatan di Era Digital*. Info Bank News. <https://infobanknews.com/ukm-indonesia-masih-hadapi-tantangan-dan-hambatan-di-era-digital/>
- OJK. (2020). *Ingin Ajukan Kredit di Bank? Kenali Dulu Agunannya*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40696>
- Rahyono, Listyaningsih, E., & Alansori, A. (2023). *Kinerja dan Keberlangsungan Kinerja UMKM*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=ot6kEAAAQBAJ>
- Rizky, M. (2023). *Sedih! Banyak UMKM RI Tak Punya Akses Kredit ke Bank, Kenapa?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230921110408-4-474345/sedih-banyak-umkm-ri-tak-punya-akses-kredit-ke-bank-kenapa>
- Rusastra, I. W., Hermawan, Iwan, & Satya, Venti E. (2018). *Paket Kebijakan Ekonomi dan Akuntansi Keuangan: Perspektif Pengembangan Umkm Promosi Ekspor*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=lvSiDwAAQBAJ>
- Sailendra, Suratno, S., & Tampubolon, M. (2020). Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 1.
- Sandi, F. B. (2023). *5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>
- Saputra, M. R. A., Chalid, F. I., & Budianto, H. (2023). *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*. Nizamia Learning Center. <https://books.google.co.id/books?id=CRvTEAAAQBAJ>
- Senyo, P. K., Karanasios, S., Gozman, D., & Baba, M. (2022). FinTech Ecosystem Practices Shaping Financial Inclusion: the Case of Mobile Money in Ghana. *European Journal of Information Systems*, 31(1), 112–127. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2021.1978342>
- Setyawati, A. (2021). *Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM: Tinjauan Empirik terhadap Pengembangan Usaha*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=4QdMEAAAQBAJ>
- Soemitra, A., Nawawi, Z. M., & Syahbudi, M. (2022). *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di*

- Indonesia. Merdeka Kreasi Group. <https://books.google.co.id/books?id=tsrJEAAAQBAJ>
- Soleman, R., & Nainggolan, B. (2022). Peran Lembaga Keuangan Non Bank terhadap Masyarakat. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i1.709>
- Suryanto, & Rasmini, M. (2018). Analisis Literasi Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i2.1336>
- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada. <https://books.google.co.id/books?id=tLteEAAAQBAJ>
- Wang, R., Lin, Z., & Luo, H. (2019). Blockchain, Bank Credit and SME financing. *Quality & Quantity*, 53(3), 1127–1140. <https://doi.org/10.1007/s11135-018-0806-6>
- Wu, Y. H., Bai, L., & Chen, X. (2023). How Does the Development of Fintech Affect Financial Efficiency? Evidence from China. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*, 36(1), 2980–2998. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2106278>
- Xiao, P., Salleh, M. I. bin, & Cheng, J. (2022). Research on Factors Affecting SMEs' Credit Risk Based on Blockchain-Driven Supply Chain Finance. *Information (Switzerland)*, 13(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/info13100455>
- Yoshino, N. (2016). Major Challenges Facing Small and Medium-Sized Enterprises in Asia and Solutions for Mitigating Them. *SSRN Electronic Journal*, 564. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2766242>